



## 36 Peserta PKH Kota Yogya Sukarela “Lepas” Bansos

**YOGYA, TRIBUN** - Sebanyak 36 peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Yogyakarta bersedia mengikuti proses graduasi mandiri di sepanjang 2025. Deretan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut merelakan bantuan sosialnya karena menyadari tingkat kesejahteraannya sudah semakin membaik.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Supriyanto, menjelaskan, graduasi menandai berakhirnya kepesertaan KPM dalam PKH. Lewat graduasi mandiri, peserta PKH mengakhiri kepesertaan dengan kesadaran sendiri, karena kondisi sosial ekonomi mulai membaik dan tidak lagi menggantungkan

bantuan dari pemerintah.

“Usulan kita mulai dari bawah. Pendamping PKH kami melakukan edukasi, motivasi terhadap KPM yang tingkat kesejahteraannya mulai membaik,” ungkapnya, Minggu (20/7).

Hingga triwulan pertama 2025, selaras data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), tercatat 12.376 KPM PKH di Kota Yogyakarta. Selepas meluluskan 36 penerima manfaat pada semester pertama tahun ini, pihaknya pun kembali mengusulkan 56 KPM untuk mengikuti proses graduasi mandiri.

“Terhadap yang graduasi, ada program pemberdayaan sosial dan ekonomi juga dari Kemensos. Bukan bansos lagi, tapi diberikan bantuan

modal usaha,” katanya.

Supriyanto mengungkapkan, untuk melepaskan ketergantungan KPM terhadap bansos memang tidak mudah membalik telapak tangan. Butuh upaya edukasi dan motivasi secara berkala, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinsosnakertrans maupun pendamping PKH di lapangan.

Ia pun menegaskan, Pemkot Yogyakarta bakal terus mendorong graduasi KPM secara mandiri, melalui rangkaian pengamatan peserta PKH. Pendamping PKH di lapangan secara rutin memantau usaha yang dijalankan, hingga pendapatan atau omzet yang dihasilkan.

“Kalau kami melihat, apalagi ini di Kota Yogyakarta, peluang untuk mengembang-

kan usaha cenderung lebih mudah, sehingga niat untuk lulus itu sebenarnya cukup tinggi,” terangnya.

Berdasarkan pemantauannya sejauh ini, rata-rata peserta PKH yang lulus pun terbukti mampu berdaya secara ekonomi. Walaupun, dia akunya ada beberapa kasus KPM yang sempat digraduasi akhirnya kembali masuk ke dalam daftar penerima bantuan dari Kemensos itu.

“Biasanya karena tersandung masalah kesehatan dan butuh biaya besar untuk berobat. Contoh, menderita gagal ginjal dan harus cuci darah. Tapi, itu jarang sekali. Kalau karena faktor ekonomi, karena sudah memiliki usaha produktif, mayoritas bisa berkembang,” pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005